

## **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis**

**Siti Zulyana**

Akuntansi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia

Email: [sitizulyana3@gmail.com](mailto:sitizulyana3@gmail.com)

**Arifah Mawaddah\***

Akuntansi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia

Email: [arifamawadda1108@gmail.com](mailto:arifamawadda1108@gmail.com)

**Rini Hartati**

Akuntansi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Indonesia

Email: [rinihartati2929@gmail.com](mailto:rinihartati2929@gmail.com)

**\*Corresponding Author**

### **Abstract:**

*In the preparation of financial statements, one of them must meet the standards of one of them, namely Government Accounting Standards. SAP is designed to create a consistent standard in the presentation of government financial information. The purpose of this study is to determine whether the application of Government Accounting Standards in the Financial Statements of the Bengkalis Regency Agricultural Office is appropriate or not. This research uses qualitative descriptive method with Field Research Type. Based on the results of the research, the Financial Statements prepared by the Department of Agriculture are not entirely wrong or not in accordance with SAP guidelines. Because as SKPD, the Agriculture Office is part of the Regional Government of Bengkalis Regency which is authorized by the regional head to carry out government functions and public services. As the holder of regional financial management power, the Regent of Bengkalis only delegates part of his authority to the head of SKPD as the budget user. As a budget user, the Department of Agriculture is responsible for submitting financial statements consisting of 5 components of financial statements to be submitted to BUD.*

**Keywords:** *Financial Statements, Government Accounting Standards, Application of Government Accounting Standards*

### **Abstrak:**

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni Standar Akuntansi Pemerintah. SAP dirancang untuk menciptakan standar yang konsisten dalam penyajian informasi keuangan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sudah sesuai atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Jenis Penelitian Lapangan. Berdasarkan hasil penelitian Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pertanian tidak sepenuhnya salah atau tidak sesuai dengan pedoman SAP.

<http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/shafin>

DOI: 10.1905/sfj.v3i1.8539

*Siti Zuliyana, Arifah Mawaddah, Rini Hartati*

Dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Bupati Bengkalis hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, Dinas Pertanian bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan untuk disampaikan kepada BUD.

**Kata Kunci:** *Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah*

## **PENDAHULUAN**

Salah satu misi pemerintahan Indonesia saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel mendorong pemerintah untuk terus berupaya memperbaiki sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi menjadi isu yang sangat penting di era reformasi saat ini untuk menciptakan *good government governance*.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang SAP, maka pemerintahan telah mempunyai landasan hukum, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan dapat dijadikan pijakan dalam pengambilan keputusan dan menjadi acuan, patokan serta standar untuk diterapkan dalam lingkup pemerintahan sehingga menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonomi Kabupaten/Kota maupun Provinsi dalam menyajikan laporan keuangan sesuai SAP pada pemerintah daerahnya.

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh suatu entitas untuk menunjukkan informasi keuangan yang terkait dengan aktivitas dan posisi keuangan entitas tersebut. Dalam konteks pemerintahan, laporan keuangan juga memiliki peran penting sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni Standar Akuntansi Pemerintah. Standar ini merupakan serangkaian prinsip, konsep, standar, dan prosedur akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah. SAP dirancang untuk menciptakan standar yang konsisten dalam penyajian informasi keuangan pemerintah, sehingga memudahkan pembaca laporan untuk memahami posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. SAP pada laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis berperan penting dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, atau lembaga keuangan. Penggunaan SAP pada laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis akan membantu dalam melakukan analisis keuangan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan pemerintah.

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan di bidang pertanian di wilayah Kabupaten Bengkalis. Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di daerah tersebut. Beberapa tugas dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis antara lain: (1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pertanian di wilayah Kabupaten Bengkalis. (2)

Melaksanakan kegiatan pengembangan, penyuluhan, pengawasan, dan evaluasi program-program di bidang pertanian. (3) Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian. (4) Melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas pangan. (5) Serta melakukan inventarisasi dan pengawasan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Bengkulu.

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu telah menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Ternyata dalam penyusunan Laporan Keuangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu dan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat beberapa komponen yang berbeda, berikut ini Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu, terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sedangkan, untuk komponen Laporan Keuangan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari tujuh komponen yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah menerapkan SAP dengan benar dan konsisten, sehingga dapat mengakibatkan penyajian informasi keuangan yang salah atau tidak akurat. Namun, laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu sudah sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintah.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS”**.

Berdasarkan identifikasi masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyusunan Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu sudah sesuai atau tidak.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu menggunakan metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan secara detail dan sistematis. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, atau kuesioner, dan menganalisis data tersebut untuk memberikan deskripsi yang akurat dan terperinci tentang fenomena yang diteliti.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Jenis penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah yang memecahkannya.<sup>2</sup>

Sumber data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya yaitu melalui wawancara langsung dengan Staf Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan *internet website*. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Milles dan Huberman. Aktivitas dalam analisa data antara lain sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

---

<sup>2</sup> Bagus Eko Dono, *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa* (Bondowoso: Guepedia, 2021).

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Teori *Good Governance*

Teori *Good governance* adalah konsep yang menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut meliputi transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang jelas, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Penerapan teori ini pada laporan keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sangat penting karena laporan keuangan adalah alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan merupakan salah satu upaya Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan *good governance* yang baik mulai diupayakan melalui akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>4</sup>

### Laporan Keuangan

#### 1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan.<sup>5</sup> Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Di mana dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan bersangkutan. Menurut Harjito dan Martono, laporan keuangan (*financial statement*) merupakan ikhtisar mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan menurut Brigham dan Ehrhardt, laporan keuangan yaitu: "*Financial statement give an accounting picture of the firm's operation and financial position*". Adalah laporan keuangan dapat memberikan suatu gambaran akuntansi dari pengoperasian dan penempatan keuangan perusahaan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan pada ruang lingkup laporan keuangan (2015) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan

---

<sup>4</sup> Haeli, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Bestari* 01, no. 01 (Agustus 2020): 1–9.

<sup>5</sup> Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).

keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil replikasi dari sekian banyak transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi dan peristiwa yang bersifat *financial* dicatat, diklasifikasikan, dan diringkas dengan cara yang tepat dalam satuan uang dan kemudian diinterpretasikan untuk berbagai tujuan.

Fahmi (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah informasi yang menggambarkan posisi laporan keuangan perusahaan dan informasi ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Subramanyam (2012), laporan keuangan adalah hasil dari proses pelaporan keuangan yang dipandu oleh standar dan aturan akuntansi, insentif manajemen, dan mekanisme penegakan dan kontrol operasional. Menurut Kasmir (2015) laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Menurut Munawir, laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi tentang status dan kinerja keuangan suatu perusahaan, sehingga laporan keuangan diharapkan dapat membantu para pemakai dalam mengambil keputusan keuangan. Menurut Baridwan, laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode. Menurut Sunyoto bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk mendapatkan informasi posisi keuangan perusahaan. Dalam laporan keuangan juga terdapat informasi tentang hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan. Dilakukannya analisis dengan membandingkan data keuangan di dua periode atau lebih dapat menghasilkan data yang lebih rinci. Sehingga rincian data tersebut dapat digunakan untuk mendukung suatu keputusan yang diambil oleh pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang berisi tentang informasi keuangan suatu entitas, yang mencakup posisi keuangan, kinerja keuangan, perubahan ekuitas, dan arus kas dalam suatu periode tertentu. Oleh karena itu, Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau *accountability* sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan dalam mencapai tujuannya. Jadi, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari ringkasan proses akuntansi yang meliputi transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi dan diolah

---

<sup>6</sup> Sufyati, *Analisis Laporan Keuangan* (Cirebon: Insania, 2021).

sedemikian rupa sehingga memberikan gambaran yang transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan.

## 2. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara informasi keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memiliki peran yang luas dan memiliki posisi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Menurut standar akuntansi (2015), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan entitas yang berguna bagi banyak pengguna dalam pengambilan keputusan keuangan. Fahmi (2012) menyatakan bahwa laporan keuangan diperlukan untuk mengukur kinerja dan perkembangan bisnis suatu perusahaan secara berkala dan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Kasmir (2015) ada beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:<sup>7</sup>

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah liabilitas dan ekuitas yang dimiliki perusahaan saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam satu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan laporan keuangan.
- h. Informasi keuangan lainnya.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan berbagai informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan sebagai alat untuk memprediksi nasib perusahaan dimasa mendatang.

Selain itu, laporan keuangan juga menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan

---

<sup>7</sup> Anton Trianto, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 03 (Desember 2017): 2.

bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi nonkeuangan.

Namun berdasarkan SAP tujuan laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.<sup>8</sup>

### 3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

#### a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

##### a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

##### b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

##### c) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

##### d) Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

---

<sup>8</sup> Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016).

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.<sup>9</sup>

#### 4. Pihak-Pihak Yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan umumnya adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan baik, hubungan bisnis, hubungan

---

<sup>9</sup> Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual pada Entitas Akuntansi* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

penyertaan modal, hubungan kerja maupun hubungan sosial masyarakat. Berikut ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan yaitu:<sup>10</sup>

- a. Investor  
Investor adalah pihak yang menginvestasikan dananya pada perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investor berkepentingan dan membutuhkan laporan keuangan untuk melihat kemungkinan potensi keuangan yang akan diperoleh dari perusahaan yang dilaporkan, dan menentukan penanaman modalnya di perusahaan tersebut.
- b. Manajer  
Manajer berkepentingan terhadap laporan keuangan, yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan, menyusun rencana lebih baik, memperbaiki sistem pengawasan dan menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lebih tepat, juga merupakan alat untuk mempertanggung jawabkan kepada pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
- c. Karyawan  
Karyawan membutuhkan laporan keuangan agar mengetahui kondisi keuangan perusahaan untuk melakukan penilaian atas kemampuan perusahaan dalam memberikan jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja.
- d. Supplier  
Supplier adalah rekanan perusahaan yang berperan sebagai penyedia bahan baku, perlengkapan maupun hal lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kepentingan supplier terhadap laporan keuangan untuk mengetahui apakah perusahaan layak diberikan fasilitas kredit, seberapa lama akan diberikan dan sejauh mana potensi resiko yang dimiliki perusahaan.
- e. Pemerintah  
Pemerintah adalah pihak yang membuat regulasi bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan diantaranya sebagai alat untuk menentukan tarif pajak yang harus dikenakan, kepatutan atas isi dan konten penyajian laporan keuangan sehingga dapat tercipta lingkungan bisnis yang sehat.
- f. Kreditur  
Kreditur merupakan pihak yang memberikan pinjaman dana kredit bagi perusahaan. Kreditur memiliki kepentingan atas laporan keuangan perusahaan sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi pemberian nilai kredit dan masa kredit dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kredit perusahaan.

---

<sup>10</sup> Agung Anggoro Seto, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).

- g. Masyarakat Umum  
Masyarakat adalah kumpulan orang yang bertempat tinggal disekitar perusahaan beroperasi. Masyarakat umum memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan sebagai alat kontrol sosial terutama untuk perusahaan-perusahaan yang sebagaian dananya diperoleh dari pemerintah.
- h. Akademisi dan Peneliti  
Akademisi dan peneliti adalah orang-orang yang berprofesi pada bidang pendidikan dan penelitian. akademisi dan peneliti berkepentingan terhadap laporan keuangan sebagai bahan dan sumber informasi yang dapat dijadikan input dan diolah untuk mengambil kesimpulan dari suatu penelitian yang dilakukan sehingga menghasilkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.

### **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

#### **1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan dengan SAP adalah untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pedoman lainnya yang digunakan sebagai dasar penggunaan SAP bagi pemerintah pusat dan daerah adalah Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis SAP, yang seluruhnya diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).<sup>11</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat (3) tentang SAP, "Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah." Menurut PP No.24 Tahun 2005 "Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia".

Menurut Bastian (2006) "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia". Menurut Bastian (2006) "Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip

---

<sup>11</sup> Temy Setiawam, *Mahir Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021).

akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”.

Menurut Tanjung (2012) dalam Vicky Agustiawan (2013) “Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD”.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan acuan wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai transparansi dan akuntabilitas. SAP dapat menjadi pedoman untuk menyatukan persepsi antara pengguna, penyusun, dan auditor. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>12</sup>

## **2. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan. Proses penyiapan SAP merupakan mekanisme prosedural yang meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan dalam setiap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) oleh Komite.

## **3. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dengan berkembangnya akuntansi di sektor retail yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), kebutuhan akan SAP kembali meningkat. Oleh karena itu, Badan Akuntansi Negara (BAKUN) dan Kementerian Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi. Seperti halnya dalam organisasi bisnis, pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Ini dapat berfungsi tidak hanya sebagai dasar pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai alat komunikasi dan sebagai cara untuk membuat manajemen organisasi bertanggung jawab kepada pihak lain. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat luas, Pengurus membutuhkan standar akuntansi divisi tersendiri. Hal ini menandai dimulainya era baru akuntabilitas dalam

---

<sup>12</sup> Sinta Putri Utami, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah,” (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2019).

pelaksanaan APBN/APBD untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk memenuhi berbagai persyaratan pelaporan keuangan, akuntansi dan audit di pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di Republik Indonesia, diperlukan sebuah SAP yang kredibel yang dibentuk oleh sebuah komite SAP.

#### 4. Laporan Keuangan Berdasarkan SAP

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika di uraikan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

##### a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (1) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
- (2) Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Adapun unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

---

<sup>13</sup> Halkadri Fitra, *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah* (Malang: CV IRDH, 2019).

- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
  - d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode tahun anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP- SAL) menyajikan pos-pos berikut:
- 1) Saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya).
  - 2) Penyesuaian SAL awal.
  - 3) Perubahan SAL:
    - a) Penggunaan SAL
    - b) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan.
    - c) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya.
  - 4) Penyesuaian SAL
  - 5) Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan.
- Laporan perubahan SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam laporan perubahan SAL dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
- c. Neraca
- Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
- a) Aset
- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk aanggotakan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan oprasioanal pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.

b) Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

c) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

d. Laporan Oprasional

Laporan oprasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan oprasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
- e. Laporan Arus Kas  
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
  - b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.
- f. Laporan Perubahan Ekuitas  
Laporan perubahan ekuitas atau disebut juga sebagai laporan perubahan modal merupakan bagian dari laporan keuangan pada siklus akuntansi, Laporan perubahan ekuitas (modal) berfungsi untuk mengetahui penggunaan modal pada pemerintah. Laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari beberapa komponen, yaitu:
  1. Modal awal.
  2. Laba bersih.
  3. Pengambilan pribadi (prive).
  4. Modal akhir.Laporan perubahan modal pemerintah dibuat setelah pembuatan laporan laba rugi dan sebelum pembuatan laporan posisi keuangan (neraca) karena laba bersih atau rugi bersih periode tersebut harus dilaporkan di laporan perubahan modal serta jumlah modal pada akhir periode harus dilaporkan di neraca. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa laporan perubahan modal juga sebagai penghubung antara laporan laba rugi dengan neraca.

- g. Catatan atas Laporan Keuangan
- Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan negatif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:
- a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi.
  - b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
  - c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
  - d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
  - e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
  - f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
  - g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

### **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis**

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis secara tepat waktu. Dalam Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis.

Penyampaian laporan keuangan ini merupakan salah satu upaya dinas pertanian Kabupaten bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan tahunan yang sesuai dengan Standar Akuntansi. Secara umum proses penyusunan laporan keuangan mengikuti siklus akuntansi yaitu mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan menjurnal. Penelitian ini hanya sampai pada penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Hasil wawancara penulis dengan Staf Bagian Keuangan dan Perlengkapan di peroleh informasi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Analisis transaksi
- b. Tahapan menjurnal transaksi
- c. Posting buku besar
- d. Neraca Saldo
- e. Jurnal Penyesuaian
- f. Menyusun neraca saldo disesuaikan
- g. Langkah oprasional menyusun neraca lajur (worksheet)
- h. Menyusun laporan keuangan
- i. Menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dalam pencatatan transaksi menggunakan penjurnalan atau melakukan posting atau pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar, yang dilakukan melalui aplikasi SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Aplikasi ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementrian dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Begitu pula unit usaha lain yang sistem pencatatannya sudah menggunakan aplikasi.

Pedoman SAP menyatakan bahwa suatu laporan keuangan harus lengkap dengan mencakup tujuh hal ini yaitu:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Oprasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Staf Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dan dengan melihat dokumen laporan keuangan tahunan diperoleh informasi bahwa laporan keuangan yang disusun

oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis tidak menggunakan semua jenis laporan. Laporan keuangan yang ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Oprasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Proses penyajian laporan keuangan dimulai dengan pencatatan atau penjurnalan transaksi yang dilakukan oleh Bidang Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis yaitu dengan mencatat nilai transaksi pada posisi debit dan kredit. Berikut contoh dari transaksi dan pencatatan (jurnal):

- a. Tanggal 3 Februari 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis menerima SP2D-UP senilai Rp. 1.175.000.000,00 (No. Bukti 00125/SP2D-UP/2020/2.00.03.01)
- b. Tanggal 17 Februari 2020 pembayaran 100% pekerjaan konsultan perencanaan kantor balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan bantan, sesuai dengan perjanjian 02/SP/PL-KONS?DISTAN-PSP/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 senilai Rp. 10.400.000,00 (No. Bukti 02/BA-SLTP/DISTAN-PSP/II/2020)
- c. Tanggal 28 Februari 2020 pembayaran utang jangka pendek lainnya (beban jasa telepon dan beban jasa listrik) senilai Rp. 11.287.577,00 (No. Bukti 005/2.00.03.01/DISTAN/2020)

Pencatatan (jurnal) yang benar dan seharusnya dibuat oleh staf Bidang Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

- a. Jurnal tanggal 3 Februari 2020  
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 1.175.000.000,00  
RK PPKD Rp. 1.175.000.000,00
- b. Jurnal tanggal 17 Februari 2020  
Bangunan gedung tempat kerja... Rp. 10.400.000,00  
Utang belanja modal gedung dan bangunan Rp. 10.400.000,00
- c. Jurnal tanggal 28 Februari 2020  
Utang jangka pendek lainnya... Rp. 11.287.577,00  
Beban jasa telepon-LO Rp. 34.070,00  
Beban jasa listrik-LO Rp. 11.253.507,00

Dari pencatatan (jurnal) diatas selanjutnya di *posting* ke buku besar sesuai dengan perkiraan, pencatatan (jurnal) pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dilakukan penjurnalan secara rinci melalui aplikasi SIPKD.

Dari segi penyajian laporan keuangan tahunan yang di buat Bagian Keuangan dan Perlengkapan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sudah memenuhi pedoman SAP yang berlaku. Seperti dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis telah menyajikan lima jenis laporan dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Bupati Bengkalis hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, Dinas Pertanian bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) yang

terdiri dari 5 komponen laporan keuangan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, BUD akan merekap semua laporan keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis dan menjadikannya laporan keuangan induk kabupaten bengkalis. Laporan induk tersebut terdiri dari 7 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## **PENUTUP**

Laporan keuangan (*Financial Statement*) merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi, sebagai ikhtisar dari transaksi-transaksi keuangan selama periode berjalan. Periode akuntansi dapat dipakai per tahun, per 12 bulan atau per 6 bulan tergantung perusahaan, namun umumnya per 12 bulan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni standar akuntansi pemerintah, standar ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah". Yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, Dalam Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2020. Ternyata untuk Laporan Keuangan yang di susun oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis dan Stardar Akuntansi Pemerintah terdapat beberapa komponen yang berbeda, berikut ini Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Oprasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan, untuk komponen Laporan Keuangan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

3. Neraca
4. Laporan Oprasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Dari perbedaan komponen laporan keuangan diatas, Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pertanian tidak sepenuhnya salah atau tidak sesuai dengan pedoman SAP. Ada alasan dibalik perbedaan tersebut yaitu dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Bupati Bengkalis hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, Dinas Pertanian bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, BUD akan merekap semua laporan keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis dan menjadikannya laporan keuangan induk kabupaten bengkalis. Laporan induk tersebut terdiri dari 7 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Anggoro Seto, *Analisis Laporan Keuangan* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Anton Trianto, "Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan pada PT. Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* 8, no. 03 (Desember 2017): 2.
- Bagus Eko Dono, *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa* (Bondowoso: Guepedia, 2021).
- Haeli, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Jurnal Bestari* 01, no. 01 (Agustus 2020): 1–9.
- Halkadri Fitra, *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah* (Malang: CV IRDH, 2019).
- Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021).
- Presiden Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan* (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

- Sinta Putri Utami, “*Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari Sebagai Badan Layanan Umum Daerah*,” (Yogyakarta, Universitas Sanata Dharma, 2019).
- Sufyati, *Analisis Laporan Keuangan* (Cirebon: Insania, 2021).
- Temy Setiawam, *Mahir Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2021).
- Wastam Wahyu Hidayat, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018).